

**FUNGSI INTERMEDIASI LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM  
MENDUKUNG PEMBIAYAAN PERTANIAN DI JAWA BARAT**  
*INTERMEDIARY FUNCTION OF RURAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN  
SUPPORTING AGRICULTURAL FINANCE IN WEST JAVA*

**Tuti Karyani<sup>1</sup>**

---

**ABSTRAK**

Saat ini di perdesaan banyak bermunculan lembaga keuangan (LK) tetapi justru permasalahan kelangkaan modal (*lack of capital*) masih sangat dirasakan oleh petani dan UMKM agribisnis. Secara umum sikap *risk averse* LK terhadap sektor pertanian dan perdesaan masih tinggi, sehingga fungsi intermediasi Lembaga Keuangan Perdesaan tidak berjalan baik. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat dengan pendekatan makro menggunakan analisis regresi panel dan secara mikro, menggunakan SEM. Hasilnya menunjukkan bahwa secara makro fungsi intermediasi LK dipengaruhi oleh DPK, NPL dan SBI. Kredit ternyata berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga dapat dijelaskan mengapa kemiskinan di Jawa Barat sulit berkurang selama fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik. Secara mikro fungsi intermediasi direfleksikan dari kualitas pelayanan yang ternyata berpengaruh positif terhadap kinerja usaha dan keberlanjutan usaha petani dan UMKM agribisnis.

Kata Kunci: Fungsi Intermediasi, kelangkaan modal

**ABSTRACT**

*Nowadays there are various rural financial institutions (RFI), but unfortunately farmers and agribusiness SMEs are still face lack of capital. In general, risk averse attitudes among RFIs upon agricultural and rural sectors were still dominant, so intermediary function of RFI was not running well. The research was conducted in West Java with at macro level using panel regression analysis and at micro level using the SEM. The results at the macro level show that RFI intermediation function was affected by TPF, NPL and the SBI. Amount of credit disburse reduce poverty level. So that poverty in West Java was difficult to be reduce as long as intermediary role of RFI was not well function. On the micro level the intermediary function reflected on the quality of service which turns a positive effect on business performance and sustainability of farmers and agribusiness SMEs.*

*Key words: Intermediary function, lack of capital*

---

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Pertanian  
e-mail: t.karyani@unpad.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Pentingnya kredit dalam pembangunan pertanian Indonesia terkait dengan tipologi petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemupukan modal untuk investasi pada teknologi baru. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh De Soto (2000) bahwa *investment is the engine for economic growth. Access to financial services can provide access to the production means required to increase agricultural productivity and scale that lead to higher incomes*. Pemilikan lahan yang sempit dan skim pembiayaan bagi usaha tani dan UMKM agribisnis yang *rigid*, menyebabkan masyarakat tani tidak dapat mengakses secara mudah sumber pembiayaan formal, sehingga sektor ini cenderung terabaikan. Kondisi ini dapat dilihat dari data bahwa hanya sekitar 2%-3% kredit yang dikucurkan terhadap sektor pertanian, demikian juga bila di segmentasikan lagi dari kredit untuk UMKM, tetap saja kredit UMKM untuk sektor pertanian hanya sekitar 3 persen.

Sebenarnya di daerah perdesaan terdapat bentuk-bentuk kelembagaan pembiayaan non formal yang sudah berkembang (Uphoff, 1986; Hastuti dan White, 1979) seperti pedagang output, pedagang input, arisan, kelompok pengajian dan sebagainya, namun potensi lembaga keuangan formal harus tetap diupayakan seoptimal mungkin karena lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang dibebankan pemerintah sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Yang dimaksud sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan dari dan untuk masyarakat. Sebagai *agent of development* adalah sebagai lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Oleh karena itu menarik untuk dikaji (1) bagaimana LK menjalankan fungsi intermediasinya dan factor apa yang mempengaruhinya (2) Bagaimana pengaruh kredit sebagai objek yang diintermediaskan terhadap kemiskinan (3) Bagaimana penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan Lembaga Keuangan Perdesaan (LKP) sebagai proksi fungsi

intermediasi serta pengaruhnya terhadap kinerja usaha dan sustainabilas usaha petani dan UMKM agribisnis.

## **II. Kerangka Pemikiran**

Dalam mekanisme fungsi intermediasi terdapat dua pihak yang terlibat langsung yaitu LKP sebagai pihak internal kelembagaan dan masyarakat sebagai pihak eksternal yang dapat dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu kelompok yang memiliki kelebihan dana (*surplus of capital*) dan masyarakat sebagai pihak yang kekurangan dana (*deficit of capital*). Pihak internal yaitu LKP memiliki kepentingan yaitu sebagai *agent of development* dan sebagai lembaga profesional pencari profit (*profit oriented*) yang menjaga keberkelanjutan usahanya. Sebagai lembaga profesional dalam rangka mengejar profit (*profit oriented*) dan menjaga keberkelanjutan usahanya, LK mempunyai prioritas dalam pengambilan keputusan, yang nampak dari perilakunya yang semakin *risk averse*. Secara umum sikap *risk averse* terhadap sektor pertanian dan perdesaan akan nampak dari kebijakan alokasi dana yang diserapnya dari perdesaan apakah disalurkan kembali ke perdesaan atau sebaliknya ditarik dan disalurkan ke sektor lain di perkotaan? Indikasi ini bisa dilihat dari *loan to deposit ratio* yang rendah dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang masih tinggi di perdesaan.

Besarnya nilai LDR akan tergantung pada kebijakan portofolio kredit dan nonkredit LKP yang juga didorong peraturan dan regulasi baik dari pemerintah atau Bank Indonesia, besarnya jumlah dana yang dihimpun, dan perkembangan sektor riil. Berdasarkan istilah kinerja keuangan, LDR ini akan dipengaruhi oleh DPK (Dana Pihak Ketiga), NPL (*Non Performing Loans*) dan tingkat bunga SBI (iSBI). Secara nasional angka LDR masih rendah yaitu sekitar 30 sampai 60 persen. Diduga bahwa berjalannya fungsi intermediasi dipengaruhi juga oleh kepemilikan dari lembaga keuangan tersebut. Adapun berjalannya fungsi lembaga keuangan juga tidak lepas dari manajemen yang diberikan mandat oleh pemilik.

Selanjutnya dari pihak eksternal LKP yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa berjalannya fungsi intermediasi berkaitan dengan kualitas pelayanan yang

diperolehnya dari lembaga tersebut. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1995,1998); terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yang dinilai sebagai berikut :

(1) *Tangibles*, merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen (2) *Reliability*, atau kehandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu (3) *Responsiveness* atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap (4) *Assurance* atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku karyawan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. (5) *Empathy* merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Justifikasinya kualitas pelayanan yang baik akan mendorong nasabah menggunakan jasa lembaga tersebut dan ini berarti lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi intermediasinya.

Berjalannya fungsi intermediasi LKP akan berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah petani dan UMKM, dengan asumsi tidak terjadi *fungibility* (penyalahgunaan kredit) dan yang pada gilirannya akan berdampak terhadap keberlanjutan usahanya (*sustainability*)

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Objek yang diteliti yaitu lembaga keuangan formal dengan alasan lembaga ini memiliki fungsi sebagai *agent of development*. Adapun tempat penelitian dilakukan di Jawa Barat (Jabar) dengan alasan karena rata-rata pangsa kredit pertanian Jawa Barat terhadap total kredit pada 3 tahun terakhir sekitar 3,8% (Bank Indonesia, 2009), padahal Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi utama padi nasional dengan luas panen (1.950.203 Ha dengan jumlah produksi 11 322 681 ton (BPS, 2009). Demikian juga bila dilihat dari jumlah penduduknya yang bekerja di sektor pertaniannya proporsinya tertinggi yaitu 40% dari keseluruhan sektor ekonomi (BI,

2010). Namun demikian, Jawa Barat sebagai propinsi terdekat dengan ibukota negara, ternyata jumlah penduduk miskinnya, pada bulan Maret 2009 sebanyak 4.983.570 orang (11,96 persen) dan yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 49,21 persen.

Selanjutnya untuk kepentingan pendekatan mikro, penetapan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik *multistage cluster sampling method* terdiri atas suatu seri klaster berdasarkan persamaan kriteria (Nan Lin, 1976). Terpilih Kabupaten Indramayu terdiri atas kecamatan Haur Geulis dan Loh Bener; Kabupaten Garut terdiri atas Kecamatan Cisurupan dan Cikajang

Teknik analisis yang digunakan untuk pendekatan makro menggunakan regresi panel dengan variabel kinerja bank yaitu LDR, DPK, NPL, SBI(t-1) selama kurun waktu 2004-2009 per tri wulan dengan data kelompok bank; untuk pengaruh kredit terhadap kemiskinan menggunakan data *cross section*-nya kabupaten dan data series tahun 2004 – 2009. Adapun untuk pendekatan mikro digunakan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan sampel sebanyak 225 orang.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Kinerja Bank di Jawa Barat dalam Menjalankan Fungsi Intermediasinya**

Berdasarkan perolehan PDRB Jawa Barat pada tahun 2010, menunjukkan kontribusi tertinggi berasal dari kegiatan industri dan pengolahan (26%), kemudian perdagangan, hotel & restoran 17%, sedangkan pertanian ada pada peringkat ke 3. Artinya pertanian masih memiliki arti penting bagi perekonomian Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2010). Walaupun demikian bila dikaitkan dengan ketenagakerjaan yang masih menampung pangsa yang besar (40%), kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi teknologi, yang pada gilirannya terkait dengan kemampuan untuk memperoleh modal.

Menurut Agrawal (2001) pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Hal ini disebabkan karena sektor keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi

intermediasinya guna menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkannya. Fungsi intermediasi dalam dunia perbankan ditunjukkan dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*), yang dalam mekanismenya dipengaruhi oleh kinerja bank lainnya, yaitu DPK, NPL dan SBI dan analisis hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel jumlah Dana Pihak Ketiga, *non-performing loan*, dan suku bunga Bank Indonesia, secara simultan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat penyaluran kredit, dilihat dari nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,91 atau 91%, sedangkan sisanya yaitu 9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti tingkat bunga masing-masing bank, jumlah modal bank dan tingkat keuntungan bank. Adapun untuk pengaruh masing-masing variabel Dana Pihak Ketiga, *non performing loan* dan suku bunga BI terhadap tingkat penyaluran kredit, dilakukan pengujian parsial uji t atau bisa dilihat dari probabilitasnya, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut masing-masing berpengaruh secara signifikan

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Regresi Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi

Variabel	Estimasi	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	124,41	7,546991	0,0000	Nyata pada $\alpha=5\%$
DPK	-8,52X10 <sup>-7</sup>	-3,897151	0,0002	Nyata pada $\alpha=5\%$
NPL	-1,94	-3,274911	0,0015	Nyata pada $\alpha=5\%$
SBI	-0,48	-1,631082	0,1066	Nyata pada $\alpha = 10\%$
AR(1)	0,95	39,23363	0,0000	Nyata pada $\alpha=5\%$
<b>Fixed Effects (Cross)</b>				
_A--C	47,37	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank BUMN		
_B--C	18,52	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank Swasta Nasional		
_C--C	-54,24	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank Swasta Asing+campuran		
_D--C	-11,65	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank BPR		
$R^2$	0,91			
F-statistic	126,23	Durbin-Watson stat		2,14
Prob(F-statistic)	0.000			

Keterangan:

DPK = Dana Pihak Ketiga

NPL = Non-performing loans

SBI = Sertifikat Bank Indonesia

. Konstanta sebesar 124,41 persen menunjukkan rata-rata penyaluran kredit jika jumlah dana pihak ketiga, *non-performing loan*, dan suku bunga Bank Indonesia sama dengan nol. Secara empiris di lapangan kondisi ini bisa terjadi pada semua bank ketika pada tahap awal pendirian dalam rangka menarik nasabah ketika DPK masih nol sehingga sangat tergantung pada modal sendiri.

Jumlah dana pihak ketiga memiliki koefisien bertanda negatif sebesar  $8,5 \times 10^{-7}$  persen, artinya bahwa setiap peningkatan jumlah dana pihak ketiga sebesar 10 triliun rupiah akan menurunkan penyaluran kredit sebesar 8,5 persen, dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel bebas lain tetap, artinya jumlah dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Hasil analisis ini menarik untuk dikaji karena tidak sesuai teori yaitu bila DPK meningkat maka diprediksi akan meningkat pula jumlah kredit yang disalurkan, tetapi kenyataannya pada kasus ini terjadi sebaliknya yaitu ketika DPK meningkat tetapi LDR menurun. Dengan memperhatikan rumus LDR maka hubungan antara jumlah kredit dengan jumlah DPK merupakan rasio, maka kejadian ini dapat dijelaskan secara logis, yaitu bahwa ketika DPK meningkat, bank membuat strategi pengaturan portofolio untuk menekan risiko disamping juga meningkatkan profitnya serta memberikan indikasi bahwa telah terjadi *credit rationing*.

*Non-performing loan* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 1,94 persen artinya bahwa setiap peningkatan *non-performing loan* sebesar 1 persen diprediksi akan menurunkan penyaluran kredit sebesar 1,94 persen dengan pengaruh signifikan pada tingkat kekeliruan 5 persen. Tinggi rendahnya NPL ini memberikan indikasi atas reputasi kerja manajemen, selain itu NPL juga memberi indikasi terhadap kondisi manajemen risiko lembaga keuangan.

Pengujian statistik secara parsial untuk SBI bertanda negatif sebesar 0,48 persen pada tingkat kesalahan 10 persen diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan  $H_a$  diterima yang berarti bila SBI meningkat 1 persen, maka LDR menurun 0,48

persen. Walaupun demikian sebenarnya mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam bentuk SBI ini memang bekerja memerlukan waktu (*time lag*). Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit dengan segera.

Persamaan pada regresi ialah model autoregresif AR (1) sebesar 0,95 persen artinya LDR yang lalu mempengaruhi LDR sekarang 0,95persen. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pengelompokkan bank, yang membedakannya ialah dari konstanta model fungsi regresinya. Kelompok bank diberi notasi A sampai dengan D. Dari persamaan modelnya dapat diartikan bahwa ada pengaruh kepemilikan yaitu bank milik pemerintah (BUMN) tingkat kemauan untuk menyalurkan kreditnya paling tinggi, berikutnya Bank Swasta Nasional, Bank BPR dan terakhir Bank Swasta Asing dan Campuran. Dengan demikian maka perlu perhatian BI agar memberikan dorongan kepada kelompok bank tersebut dalam menyalurkan kreditnya. Untuk BPR, walaupun tambahan nilai konstanta negatif tetapi masih lebih besar dari 100 persen akumulasinya, diduga karena modal sendiri kelompok BPR yang masih rendah sehingga kemampuan menyalurkan kreditnya juga lebih rendah. Namun untuk Jawa Barat saat penelitian ini dilakukan sedang dalam proses konsolidasi BPR antara lain melakukan restrukturisasi manajemen dan masuknya BJB sebagai pemilik utama BPR pemda (51%).

Dari nilai konstanta yang berbeda ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja bank termasuk LDR. Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian BI yang melakukan untuk cakupan Indonesia (131 bank), yang menunjukkan bahwa kinerja bank ada sedikit keterkaitan dengan struktur kepemilikan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen (Hadad M,dkk, 2003). Namun hasil kajian Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) di 60 negara yang antara lain menyimpulkan bahwa kepemilikan bank sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kinerja bank tersebut, yang lebih berpengaruh adalah



manajemennya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan bank dalam membuat kepatuhan manajemen terhadap pemilikinya dimulai dari pemilihan manajemen.

Selanjutnya hasil analisis pengaruh kredit yang disalurkan terhadap kemiskinan diperoleh sebagaimana pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan (dalam lon)

Variabel	Koefisien	t statistik	Probabilitas	Keterangan
C	15,11	14.62206	0.0000	Nyata pada $\alpha = 5\%$
Kredit	-0,22	<b>-4.542087</b>	<b>0.0000</b>	Nyata pada $\alpha = 5\%$
JLK	-0,015	-0.415414	0.6788	Tidak signifikan
PDRB	-0,013	0.148717	0.8821	Tidak signifikan
AR (1)	0,526	9.732046	0.0000	Nyata pada $\alpha = 5\%$
R-squared	0,99			
Prob(F-statistic)	0,000	D-W	2,13	
F-statistic	374,7			

Dilihat dari nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,99 atau 99%, artinya kredit, jumlah lembaga keuangan, dan PDRB per kapita secara simultan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penyaluran kredit sebesar 99% sedangkan sisanya yaitu 1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Untuk pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa secara simultan besarnya kredit, jumlah lembaga keuangan, PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5% hanya jumlah kredit yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Untuk jumlah lembaga keuangan dan PDRB perkapita secara parsial ternyata tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Persamaan regresi panel pada Tabel 2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: konstanta 15,15 menunjukkan rata-rata penduduk miskin 15,15% dari keseluruhan penduduk jika jumlah kredit yang disalurkan, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan perdesaan dan PDRB perkapita sama dengan nol. Kondisi ini mendekati fakta bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Tahun 2010 sebesar 12,74%

yang tertinggi di Kabupaten Bogor dan terendah di Kotif Banjar. Sejalan dengan fakta, ternyata dari hasil analisis regresi juga bila dilihat konstanta tambahan untuk per kabupaten ternyata tertinggi di Kabupaten Bogor yaitu 1,47% dan terendah di Kotif Banjar (-2,81%) . Hasil uji pengaruh AR(1) terhadap tingkat kemiskinan secara parsial 52,3% dipengaruhi secara positif oleh kemiskinan periode sebelumnya secara signifikan.

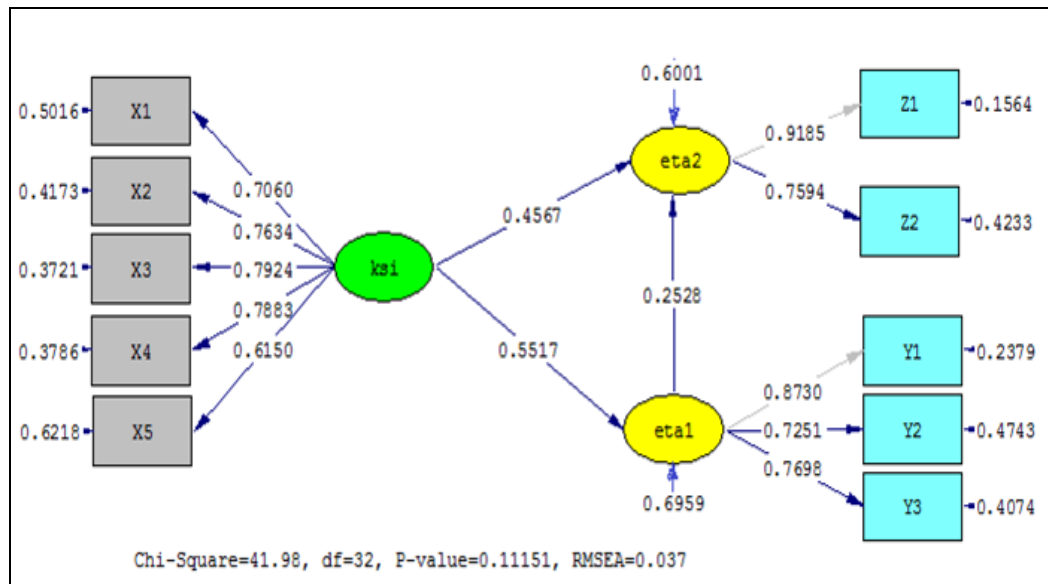
Dengan hasil analisis regresi panel tersebut dapat dikatakan bahwa kredit berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga sejalan dengan paradigma teori moneter baru yang berpandangan bahwa ketersediaan kredit (*quantity of credit*) akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bukan *quantity of money* (Stiglitz dan Greenwald, 2003). Oleh karena itu, bank sangat berperan dalam menentukan perilaku perekonomian secara keseluruhan (*institutional economics*) sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi dari pihak yang *surplus of fund* dengan *deficit of fund*. Kaitan dengan peran kredit dalam mereduksi kemiskinan, memerlukan pengawasan yang cermat dalam penggunaannya agar tidak terjadi *fungibility*. Selain itu, pengaruh kredit juga dalam transmisinya memerlukan waktu dan proses yaitu dengan adanya kredit akan menarik kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan daya beli sehingga bisa mendorong keluarga keluar dari kelompok penduduk miskin. Fenomena bahwa kredit investasi pengaruhnya terasa dalam jangka panjang juga terjadi di Afrika Selatan dan di beberapa negara lainnya (ADB,2001; Allen dan Ndikumana, 1998).

Pengaruh faktor PDRB yang tidak signifikan menunjukkan bahwa walaupun PDRB tinggi tetapi karena merupakan perhitungan rata-rata, maka tidak menunjukkan adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Adapun untuk jumlah lembaga keuangan yang tidak signifikan memberikan indikasi bahwa masyarakat masih belum memiliki akses yang tinggi terhadap pelayanan bank walaupun jumlah bank sudah meningkat. Penelitian Pie Guo di China (2009) bahkan menyebutkan bahwa lembaga-lembaga keuangan di Cina tampaknya justru telah merampok uang kaum miskin untuk dipinjamkan kepada orang kaya di perkotaan, sehingga akhirnya dilakukan reformasi kebijakan

yang ternyata hasilnya cukup baik, yaitu munculnya kompetisi pelayanan dari lembaga keuangan terhadap masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, fenomena menyerbunya lembaga keuangan ke perdesaan perlu disikapi dengan baik dan bijaksana yang disertai pengawasan yang proporsional oleh Bank Indonesia.

#### 4.2 Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Terhadap Kinerja Usaha dan Keberlanjutan Usaha Nasabah

Secara mikro pengaruh fungsi intermediasi diproksi dari penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan LKP. Setelah pengujian asumsi yang menunjukkan bahwa data valid dan reliable, untuk variabel baik fungsi intermediasi, kinerja usaha dan keberlanjutan usaha. Adapun untuk uji normalitas multivariate menunjukkan data tidak normal p-value ( $< 0,05$ ). maka metode estimasi yang cocok digunakan untuk menguji pengaruh fungsi intermediasi terhadap sustainabilitas melalui variabel kinerja usaha sebagai variabel antara adalah metode *robust maximum likelihood*. Pada uji kecocokan model (*goodness of fit*) menyimpulkan bahwa model dapat diterima, artinya model yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Hasil analisis seperti terlihat pada Gambar 1 .



Fungsi intermediasi (ksi) dapat memberikan penjelasan sebesar  $(0,5517^2 \times 100\%) = 30,44\%$  terhadap kinerja usaha petani dan UMKM berbasis agribisnis ( $\eta_1$ ) dan sisanya sebesar 69,56% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian secara bersama-sama fungsi intermediasi dan kinerja usaha memberikan penjelasan sebesar 39,99% terhadap sustainabilitas petani dan UMKM berbasis agribisnis ( $\eta_2$ ), sedangkan sisanya sebesar 60,01% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti yang berkontribusi terhadap sustainabilitas (keberlanjutan usaha). Artinya model SEM yang mengacu pada berjalannya fungsi intermediasi sudah baik dan signifikan walaupun hanya memberikan penjelasan 30% sampai 40%, karena faktanya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dan juga keberlanjutan usaha.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

1. a. Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan (LK) pada tingkat makro di Jawa Barat pada kurun waktu 2004-2009, memberikan indikasi adanya penyaluran dana kepada instrumen keuangan lain selain kredit atau ke sector lain (*capital flight*), bahkan ada indikasi telah terjadi *credit rationing*, dilihat dari DPK (dana pihak ketiga) yang hubungannya negative dengan LDR. Variabel NPL (*nonperforming loan*) sebagai indikator risiko, mempengaruhi fungsi intermediasi dengan hubungan negatif, karena akan berkontribusi terhadap kesehatan bank. Demikian juga BI rate (Suku Bunga Setifikat Bank Indonesia) sebagai instrument kebijakan BI masih dijadikan acuan bank walaupun dalam transmisinya memerlukan waktu (*time lag*).
- b. Fungsi intermediasi Bank milik pemerintah lebih baik dibandingkan dengan Bank milik swasta, hal ini sesuai dengan *agency theory* yaitu orientasi perusahaan tergantung dari orientasi pemilik (*principal*).
2. Fungsi intermediasi LK yang ditunjukkan dari jumlah kredit yang disalurkan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yaitu semakin besar nilai kredit yang disalurkan maka kemiskinan akan berkurang. Hal ini menunjukkan relevansi yang

kuat dengan teori Nurkes yaitu investasi (dalam hal ini melalui kredit) dapat memutus rantai kemiskinan.

3.a. Berdasarkan penilaian dari nasabah, fungsi intermediasi lembaga keuangan perdesaan yang paling baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional diantara LKP BRI Unit, BPR dan Koperasi ialah BRI Unit. Kunci keberhasilan dari BRI Unit ialah karena adanya “mantri” sebagai ujung tombak (agen) yang menjembatani hubungan antara BRI Unit dengan nasabahnya

Pada fungsi intermediasi ini, hubungan agensi bukan hanya terjadi antara pemilik LKP dengan manajemen tetapi antara LKP dengan nasabahnya. Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa fungsi intermediasi pada tingkat makro (diproksi dari LDR) dinilai kurang baik, tetapi pada tingkat mikro sudah cukup baik.

4. Fungsi intermediasi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha terutama dalam penguatan permodalan dan produktivitas adapun untuk peningkatan teknologi masih belum terrefleksikan dengan baik. Fungsi intermediasi dan kinerja usaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha baik langsung maupun tidak langsung terutama dalam meningkatkan kemampuan mendapat keuntungan.

## **5.2 Saran**

1. LDR perlu ditingkatkan terus (terutama untuk *Branch Banking System*) dengan memberikan keterjaminan kepada LK melalui dilibatkannya Lembaga Penjamin Kredit (LPK). Subsidi kredit bisa direalokasi untuk kepentingan permodalan penjaminan kepada LPK. Tingkat bunga kredit yang dibebankan perlu lebih ditekan lagi dengan mengurangi *spread* antara bunga kredit dan bunga tabungan, adapun alternatif pengurangan suku bunga bisa direalokasi dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) LK.

2. Untuk memelihara eksistensi LKP yang sudah ada, maka LKP harus terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenangkan persaingan dengan para pemain baru dengan memperbaiki sikap *empathy* terhadap nasabah. Oleh karena itu peran agen seperti Mantri (di BRI) perlu ditingkatkan. Selain itu, LKP perlu menerapkan lebih fleksibel cara pembayaran kembali kredit perdesaan disesuaikan

dengan tipe usaha nasabah. Penerapan teknik pembayaran kredit ‘yarnen’ pada usahatani perlu dikembangkan terus dengan penyesuaian bunga sesuai lama pinjaman.

3. Mobilisasi tabungan sebagai sumber permodalan sekaligus merupakan edukasi bagi masyarakat untuk hidup hemat dan meningkatkan pemupukan modal. Tabungan selain dapat memperkuat DPK, dapat juga membantu memperkuat kepemilikan lokal untuk desentralisasi organisasi yang berbasis anggota.

4. Dengan masih berlakunya *agency theory* dengan cirri-ciri adanya pengaruh kepemilikan, terjadinya asimetris informasi, serta adanya *credit rationing*, maka implikasi terorisnya perlu penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *credit rationing* (penjatahan kredit). Demikian juga untuk penelitian pengaruh kredit terhadap pengurangan kemiskinan perlu pendekatan analisis yang lebih rinci baik dari jenis kredit maupun kriteria kemiskinannya. Implikasi kebijakannya ialah perlunya kebijakan pengawasan BI yang mendorong tidak terjadinya *credit rationing* dan *fungibility* penggunaan kredit.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Promotor: Prof.Dr.H.Maman H.Karmana,Ir.,MSc (Ketua promotor); Prof.Dr.H Burhan Arief,Ir., Dr.Ronnie S Natawidjaja.Ir.,MSc (Co-promotor) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun disertasi ini. Demikian juga penulis sampaikan terimakasih kepada tim oponen yang telah memberi masukan kritis atas disertasi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada Dirjen Dikti yang telah memberikan dana BPPS on going selama 2 tahun dan juga kepada Rektor Unpad yang telah memberikan dana BPP ketika belum memperoleh BPPS, demikian juga terimakasih atas dana Hibah Doktor yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2001. *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. Manila. Asian Development Bank.
- Agrawal, J.D. and Agrawal, Aman. 2001, Liberalization of Capital Flows, Banking System & Trade: Focus on Crisis Situations, *International Review of Comparative Public Policy titled nternational Financial Systems and Stock Volatility* Volume 13, pp. 151-212.
- Allens, Donald S dan Leonce Ndikumana .1998. *Financial Intermediation and Economic Growth in Southern Africa*. Working Paper 1998-004B. Melalui: <http://research.stlouisfed.org/wp/1998/98-004.pdf> federal reserve bank of st. Louis
- Bank Indonesia, 2009. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2009*. Kantor Bank Indonesia. Jawa Barat.
- Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) “Banking System Around the Globe : Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability ?”, February 2000.
- BPS, 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat* No. 27/07/32/Th. XI, 1 Juli 2009.
- , 2010. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi*, Maret 2009. Jakarta
- De Soto, Hernando. 2000. *The Mystery of Capital*. New York: Basic Books
- Hadad, Muliaman D., Wimboh Santoso, Dwityapoetra S 2003. *Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia:Apakah Bunga Kredit Bank Umum Overpriced?* Oktober 2003.BI. [www.bi.go.id/Studibiayaintermediasi\\_bbrpbankbesar.pdf](http://www.bi.go.id/Studibiayaintermediasi_bbrpbankbesar.pdf) [23/1/2010]
- Hastuti E.L. dan Benjamin White. .1979. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Skala Kecil di Enam Desa Contoh di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, Jawa Barat*. .Bogor. SDP/ SAE Bogor.
- Nan Lin, 1976. *Foundations of Social Research*. Mc Graw-Hill, Departement of Sociology State University of New York , Albany
- Parasuraman, A. Valarie, A. Zeithaml, & L. Berry, 1998. Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality, *Journal of Marketing*, Vol. 52,pp.35-48.
- Pei Guo , 2009. *The structure and reform of rural Finance in China*. China Agricultural Economic Review, Vol. 1 No. 2, 2009, Emerald Group Publishing Limited. Center for Chinese Agricultural Policy, China Academy of Sciences,Beijing, People’s Republic of China. Beijing.
- Stiglitz and Greenwald, 2003). *Toward a New Paradigm in Moneraty Economics*. Cambridge University Press. [www.Amazon.com/Paradigm](http://www.Amazon.com/Paradigm) economics. Raffaele Mattioli
- Uphoff , Norman. 1986. *Local Institutional Development*. An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.

**FUNGSI INTERMEDIASI LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM  
MENDUKUNG PEMBIAYAAN PERTANIAN DI JAWA BARAT**

***INTERMEDIARY FUNCTION OF RURAL FINANCIAL INSTITUTIONS  
IN SUPPORTING AGRICULTURAL FINANCE IN WEST JAVA***

**ARTIKEL ILMIAH**

**Oleh :**

**Tuti Karyani**

150130080006



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2012**



